



**BPK RI
Perwakilan
Provinsi Riau**

Nama Media
Hari/ Tanggal
Halaman/ Kolom
Wilayah/ Kode
Tema

:Tempo
:Senin/5 Mei 2014
:17/1-5
:Jakarta/ Berita BPK
:Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Rizal Djalil: BPK Akan Mengaudit
Kinerja Perpajakan

KETUA BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN
RIZAL DJALIL:

BPK Akan Mengaudit Kinerja Perpajakan

Rachma Tri Widuri

rachma.triwiduri@tempo.co.id

Rizal Djalil resmi menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun pada 21 April lalu. Meski hanya menjabat hingga Oktober mendatang, Rizal memastikan akan melakukan banyak hal, termasuk meningkatkan kuantitas audit kinerja pemerintah. Ia akan berfokus pada audit program subsidi dan penerimaan perpajakan. "Subsidi dan penerimaan negara harus menjadi prioritas," kata dia, kepada Angga Sukma Wijaya dan Faiz Nashrillah dari *Tempo*, di kantornya, Jumat pekan lalu. Berikut ini petikan wawancaranya.

Apa yang akan Anda lakukan selama enam bulan masa jabatan ini?

Saya akan meningkatkan jumlah pemeriksaan terkait dengan kinerja. Contohnya, audit terhadap kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bisa diketahui apa penyebab mahalnya harga obat di sini. Untuk audit seperti bantuan sosial, tidak perlu diminta. Itu akan muncul dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Saya juga berniat memasyarakatkan hasil audit. BPK tidak bisa seperti institusi yang dianggap menyeramkan.



Kami akan berusaha mengajak *stakeholder* mencegah penyimpangan.

Seberapa efektif audit kinerja terhadap perbaikan kebijakan pemerintah dan pengelolaan keuangan?

Dengan audit kinerja, akan diketahui *output* dari program pemerintah. Mengapa target tidak tercapai dan apa persoalan mendasarnya. Artinya, audit akan diprioritaskan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Misalnya, audit mengenai program beras miskin, itu sudah ke tema tertentu. Kami ingin tahu bagaimana uang Rp 21 triliun itu dikelola.

Apakah audit subsidi akan menjadi prioritas BPK?

Bisa saja kami melakukan audit kinerja yang sarat akan kepentingan publik. Tidak tertutup kemungkinan kami akan melakukan audit kinerja terkait dengan

PLN, Pertamina, dan sebagainya.

Apakah BPK juga akan melakukan audit lanjutan terhadap kontrak karya. Banyak temuan perusahaan tambang tak tuntas membayar royalti?

Bukan hanya kontrak karya. Semua hal yang terkait dengan peningkatan penerimaan negara juga akan menjadi prioritas kami. Soal pajak, kami akan mencari tahu penyebab PPh pribadi yang rendah sekali. Pemeriksaan yang terkait dengan pajak harus dilakukan secara hati-hati.

Apakah pengelolaan pajak selama ini masih belum optimal?

Saya melihat itu. Silakan tulis besar-besar, saya setuju pajak itu harus menjadi badan tersendiri. Mengapa? Porsi penerimaan negara pada sektor pajak lebih dari 80 persen, tapi masih di bawah satu departemen. Untuk mengangkat pegawai

saja lama. Waktu saya memimpin Panitia Khusus Pajak, sudah hampir ketok palu agar pajak jadi badan sendiri. Saya melihat Direktorat Jenderal Pajak sudah saatnya bisa menjadi badan sendiri atau di bawah presiden, dan berkoordinasi dengan menteri keuangan.

Apakah bisa selesai dalam enam bulan?

Kami akan langsung turun dan tentukan prioritas. Ada audit yang sudah selesai pada level eselon satu, salah satunya mengenai pajak. Pasti selesai.

Pimpinan BPK banyak dari kalangan politikus, termasuk Anda. Bagaimana cara menjaga integritas dan independensi BPK?

Tidak perlu lagi berdebat soal sipil-militer, atau politikus dan bukan politikus. Negara ini dibangun oleh politikus. Soekarno-Hatta itu politikus. Sekarang media, DPR dan semua orang bisa mengawasi. ●